

---

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI  
LAPORAN KEUANGAN SELURUH DESA DI KECAMATAN MASBAGIK**

**Sahrul Ihsan<sup>1</sup> Ahmad Murad<sup>2</sup>**

**Universitas Gunung Rinjani**

email : sahrulihsan751@gmail.com<sup>1</sup> ahmadmurad2012@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia, implementasi SAP dan pengawasan keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan di desa sekecamatan Masbagik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif. “Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh desa di kecamatan Masbagik yang berjumlah 10 desa dengan responden 8 orang staf pada masing-masing desa yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan yakni PKPKD ataupun PPKD dalam pemerintahan desa itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. pengawasan keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh seluruh desa di kecamatan Masbagik.

**Kata Kunci:** Kompetensi Sumberdaya Manusia, Implementasi Sap, Pengawasan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan

**1. Pengantar**

Akuntansi sektor publik dewasa ini sedang mengalami perkembangan, ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat, daerah maupun desa. Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Informasi yang dihasilkan tentunya harus berkualitas yang mangacu pada “karakteristik sebagaimana yang disyaratkan komite standar akuntansi pemerintah tahun 2019 tentang standar akuntansi pemerintah yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami” (Bastian, 2006:97).

Pemerintah desa dituntut untuk dapat memenuhi kriteria umum karakteristik kualitatif laporan keuangannya, mengingat desa pada masa ini mulai menjadi tujuan pengamatan sebagian besar pihak karena dihadapkannya PP nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN. Begitu besarnya perhatian berbagai pihak tidak lain karena pemberian

dana desa yang jumlahnya semakin besar oleh pemerintah pusat. Bahkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 dijelaskan khusus mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diantaranya pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran serta dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Transparan yakni keterbukaan tentang penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kebijakan, penganggaran sampai dengan hasil yang diperoleh. Akuntabel yakni pertanggung jawaban pemerintah terkait kebijakan yang telah ditetapkan. Serta disiplin anggaran penempatan anggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten.

Selain itu pada bagian keempat pasal 37 permendagri tentang pelaporan dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua. Laporan semester pertama sebagaimana yang dimaksud berupa laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan sedangkan laporan semester kedua atau semester akhir tahun sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2014, desa menjadi konsentrasi yang serius oleh pemerintah pusat, dengan dana yang diturunkan langsung dari APBN menyebabkan pemerintah desa harus lebih serius dalam mengelola dana desa yang begitu besar. Desa sebagai ujung tombak terhadap pelayan langsung kepada masyarakat membuat pemerintah ingin lebih serius dalam hal memajukan Desa dengan memberikan anggaran yang lebih besar. Besarnya dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat tentunya juga berimbas pada pertanggung jawaban yang lebih besar. Oleh karenanya, dana realisasi desa harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang menjadi informasi pemerintah guna melihat perkembangan desa. Begitu besarnya dana desa juga mendorong pelaporan keuangan desa harus sewajarnya, lengkap, transparan dan akuntabel sesuai dengan asas pelaporan yang sudah ditetapkan oleh permendagri nomor 20 tahun 2018.

Sebab pentingnya laporan keuangan desa itulah membuat penulis ingin meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat laporan keuangan khususnya di desa menjadi berkualitas yang sesuai dengan asas pelaporan menurut Permendagri. Menurut inspektorat Lombok Timur, Drs. Haris, MAP pada Suara NTB tahun 2017, desa terbilang lemah pada aspek administrasi dan mengarahkan seluruh desa di Lombok Timur menggunakan siskeudes (sistem keuangan desa) dalam penyusunan APBDes. Berkaitan dengan informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan desa di Lombok Timur khususnya di Masbagik secara umum belum memenuhi kriteria informasi yang disyaratkan, untuk itu diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) serta pengawasan keuangan agar kualitas laporan keuangan desa menjadi lebih baik.

Laporan keuangan sendiri merupakan satu dari beragam informasi yang digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan. Agar tujuan penyusunan laporan keuangan bisa tercapai yakni dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan khususnya pada organisasi pemerintahan tentunya dibutuhkan laporan keuangan yang berkualitas yang bisa mencerminkan seluruh kegiatan operasional selama periode pelaporan. Komite standar akuntansi pemerintah telah menetapkan syarat kualitatif penyusunan laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dipahami serta dapat dibandingkan. Hal ini berarti bahwa penyusunan laporan keuangan harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar bisa digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Untuk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan tersebut setidaknya diperlukan tiga faktor yang harus ada pada setiap organisasi

pemerintahan, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten, penerapan atau pengimplementasian standar akuntansi pemerintah serta pengawasan keuangan yang ketat.

Memiliki sumber daya yang kompeten adalah keharusan bagi suatu organisasi. Mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensi diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan untuk pencapaian tujuan. Di beberapa desa, pemilihan bendahara oleh kepala desa tidak berdasarkan kemampuan akademik dibidang akuntansi yang seharusnya menjadi syarat utama perekrutan. Kurangnya jajaran staf desa terutama dibidang ini menjadi salah satu faktor masih lemahnya desa dalam pelaporan keuangannya. Oleh karenanya sumber daya yang kompeten khususnya dalam bidang keuangan diyakini bisa membuat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan suatu organisasi menjadi lebih baik karena pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang dimiliki.

Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Malle (2013) yang dilakukan di pemerintah kota Makassar menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah kota Makassar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah implementasi SAP (standar akuntansi pemerintah). SAP ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah sebagai dasar/pedoman dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah atau organisasi sektor publik lainnya. Tujuan penyusunan standar akuntansi pemerintah adalah sebagai acuan bagi para pembuat laporan keuangan entitas tertentu dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Karena SAP merupakan pedoman atau dasar sebuah laporan keuangan dibuat, oleh karenanya penerapan standar-standar tersebut akan bisa membuat sebuah laporan keuangan menjadi lebih berkualitas sesuai karakteristik kualitatif yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai implementasi SAP pernah dilakukan oleh Nasution dan Br. Barus (2019) pada pemerintah kota Tanjung Balai dan mendapatkan implementasi SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangannya.

Yang terakhir yakni pengawasan keuangan, pengawasan keuangan diperlukan supaya pengelolaan dana yang telah diberikan dipergunakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pemerintah desa pengawasan keuangan atau pengawasan dana desa disebutkan dalam permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 74 tentang pengawasan dan pembinaan. Untuk menghindari manipulasi sebuah laporan keuangan tentunya diperlukan adanya pengawasan sehingga para pembuat laporan tetap mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan agar kualitas sebuah laporan keuangan lebih terjamin.

Dalam penelitian Malle (2013), pengawasan keuangan tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar. Hasil penelitian yang berbanding terbalik dengan teori yang didapat membuat peneliti ingin meneliti lagi pengaruh variabel pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

## **2. Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif. “Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih” (Anshori dan Iswati, 2017:13). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari bukti yang terjadi antara pengaruh variabel kompetensi SDM, implementasi SAP dan pengawasan keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa dikecamatan Masbagik.

Pengambilan sampel terhadap responden dilakukan dengan *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja

dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah dipilih ataupun yang ditetapkan peneliti. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah kepala desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2008 pasal 1 ayat 15 sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa (PKPKD). Berikutnya adalah pasal 4 yakni Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) antara lain yang terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan kasi; dan
- c. Kaur keuangan

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh desa di kecamatan Masbagik yang berjumlah 10 desa dengan responden 8 orang staf pada masing-masing desa yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan yakni PKPKD ataupun PPKD dalam pemerintahan desa itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan cara mengkuantitatifkan data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala likert 5 poin (*5-point likert scale*). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena (Sugiyono, 2018:134). Adapun instrumen skala likert 5 poin antara lain: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

Teknik pengumpulan data melalui metode kuisioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa di kecamatan Masbagik. Penyebaran kuisioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada 8 orang staff desa yang termasuk PKPKD ataupun PPKD.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berikut disajikan tabel analisis data statistik deskriptif.

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Variance
SDM	59	15	35	50	43,12	3,450	11,899
SAP	59	9	21	30	25,58	2,167	4,697
PK	59	18	37	55	47,47	4,120	16,978
Kualitas LK	59	14	36	50	42,85	3,398	11,545
Valid N (listwise)	59						

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah data valid pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebanyak 59 dengan nilai minimum 35, nilai maximum 50, mean 43,12 dan standar deviasi 3,450 serta nilai varians sebesar 11,899. Karena nilai rata-rata variabel kompetensi sumber daya manusia lebih besar dari nilai standar deviasi, maka data penelitian ini baik untuk digunakan.

Jumlah data valid pada variabel implementasi standar akuntansi pemerintah sebanyak 59 dengan nilai range 15, nilai minimum 21, nilai maximum 30, mean 25,58 dan standar deviasi 2,167 serta nilai varians sebesar 4,697. Karena nilai rata-rata variabel implementasi standar akuntansi pemerintah lebih besar dari nilai standar deviasi, maka data penelitian ini baik untuk digunakan.

Jumlah data valid pada variabel pengawasan keuangan sebanyak 59 dengan nilai range 9, nilai minimum 37, nilai maximum 55, mean 47,47 dan standar deviasi 4,120 serta nilai varians sebesar 16,978. Karena nilai rata-rata variabel pengawasan keuangan lebih besar dari nilai standar deviasi, maka data penelitian ini baik untuk digunakan.

Jumlah data valid pada variabel kualitas informasi laporan keuangan sebanyak 59 dengan nilai range 14, nilai minimum 36, nilai maximum 50, mean 42,85 dan standar deviasi 3,398 serta nilai varians sebesar 11,545. Karena nilai rata-rata variabel kualitas informasi laporan keuangan lebih besar dari nilai standar deviasi, maka data penelitian ini baik untuk digunakan.

**Tabel 2 Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,290	4,108		2,992	,004
SDM	,040	,148	,040	,266	,791
SAP	,968	,249	,618	3,897	,000
PK	,086	,131	,104	,657	,514

a. Dependent Variable: Kualitas LK

Berdasarkan tabel 2 diatas maka diperoleh hasil persamaan regresi nilai konstanta ( $\alpha$ ) pada hasil uji regresi menunjukkan angka sebesar 12,290. Artinya jika variabel bebas (kompetensi SDM, implementasi SAP dan pengawasan keuangan) bernilai nol, maka nilai variabel terikat (kualitas informasi laporan keuangan) adalah sebesar 12,290.

Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,040 dan bergerak kearah positif, artinya jika variabel kompetensi sumber daya manusia meningkat satu satuan dan variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0,040. Ini menggambarkan bahwa semakin baik kompetensi SDM yang ada dalam lingkup pemerintah desa, maka akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa tersebut.

Nilai koefisien variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah adalah 0,968 dan bergerak kearah positif, artinya jika variabel implementasi standar akuntansi pemerintah meningkat satu satuan dan variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0,968. Artinya semakin baik penerapan pedoman atau standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah dalam membuat laporan keuangan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut.

Nilai koefisien variabel Pengawasan Keuangan adalah sebesar 0,086 dan bergerak kearah positif, artinya jika variabel pengawasan keuangan meningkat satu satuan dan variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0,086. Hal ini menunjukkan peranan pengawasan keuangan yang baik akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pada pemerintah desa kecamatan Masbagik.

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara individu terhadap variabel terikat. Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak maka

dilakukan pengujian dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  menggunakan taraf kepercayaan 5%. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dan jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Nilai  $t_{hitung}$  didapat dari hasil output SPSS 22, sedangkan nilai  $t_{tabel}$  didapat dari rumus ( $df = n-k-1$ ) menggunakan taraf kepercayaan 5% dengan uji 2 sisi ( $0,05/2 = 0,025$ ). Dengan demikian ditemukan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,004. Berikut disajikan tabel uji parsial dari output SPSS 22.

**Tabel 3 Hasil Uji Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,290	4,108		2,992	,004
SDM	,040	,148	,040	,266	,791
SAP	,968	,249	,618	3,897	,000
PK	,086	,131	,104	,657	,514

a. Dependent Variable: Kualitas LK

Hasil pengujian hipotesis  $H_1$  menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa di kecamatan Masbagik, ini dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  dari variabel kompetensi SDM lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  ( $0,266 < 2,004$ ) dan nilai signifikansinya melebihi 0,05 yakni sebesar 0,791. Dengan demikian variabel kompetensi sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa di kecamatan Masbagik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukmaningrum (2012) yang mendapatkan variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota Semarang. Sedangkan hasil penelitian Malle (2013) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah kota Makassar.

Hasil variabel kompetensi sumber daya manusia yang tidak berpengaruh secara signifikan diindikasikan bisa disebabkan karena latar belakang pendidikan responden yang masih rendah dan jurusan yang bermacam-macam. Tercatat strata pendidikan SLTA/ sederajat masih terbilang besar yakni sekitar 42,38% dari total responden. Walaupun yang memiliki strata pendidikan S1 paling besar sekitar 57,45%, akan tetapi jurusan yang tidak murni akuntansi juga bisa menyebabkan hasil hipotesis pada penelitian ini tidak signifikan.

Hasil pengujian hipotesis  $H_2$  menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa di kecamatan Masbagik. Ini dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  variabel implementasi SAP lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yakni ( $3,897 > 2,004$ ) dan nilai signifikansinya lebih rendah dari 0,05 yakni sebesar 0,000. Dengan demikian variabel implementasi standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa di kecamatan Masbagik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Angelicca (2019), Nasution dan Br. Barus (2019) dan Pujanira (2017) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing tempat penelitian. Sedangkan

menurut temuan Ikhsan (2018) variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD kota Medan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa responden atau staf seluruh desa yang ada dikecamatan Masbagik telah mengerti dan menerapkan dengan baik standar akuntansi yang telah ditetapkan pemerintah, mengingat sebagian besar responden memiliki strata pendidikan yang cukup baik yakni S1 sebesar 57,45% dan sebagian besar memiliki umur yang masih tergolong muda yakni kisaran 31-40 sebesar 66,1% sehingga standar akuntansi pemerintah bisa dipahami dan diterapkan dengan maksimal.

Hasil pengujian hipotesis  $H_3$  menunjukkan bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa di kecamatan Masbagik. Ini dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  variabel pengawasan keuangan lebih rendah dari nilai  $t_{tabel}$  yakni  $(0,657 < 2,004)$  dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,514. Dengan demikian variabel pengawasan keuangan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa dikecamatan Masbagik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Malle (2013) dimana variabel pengawasan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah kota Makassar. Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Fransiska (2015) yang mendapatkan variabel pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Labuhan Batu.

Pengawasan merupakan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab institusi pengawas. Institusi pengawas seperti Inspektorat LOTIM bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif dan sebagainya. Tapi jauh dari anggapan itu, lembaga pengawas ini sudah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Itu terbukti dari temuan-temuan penyelewengan anggaran oleh oknum pemerintah desa yang diberitakan oleh situs resmi berita di Lombok. Namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud.

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Semakin tinggi nilai *Adjusted R Square*, maka semakin baik variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat.

**Tabel 4 Hasil Uji Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,733 <sup>a</sup>	,537	,512	2,373

a. Predictors: (Constant), PK, SDM, SAP

Dari tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Adjust R Square* sebesar 0,512. Hal ini berarti bahwa 51,2% variabel kualitas informasi laporan keuangan dapat dijelaskan oleh ke-3 prediktor yang digunakan pada penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 48,8% (100% - 51,2%) disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model regresi atau yang tidak digunakan pada penelitian ini. Contoh variabel-variabel yang tidak digunakan seperti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi dan sebagainya.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa di kecamatan Masbagik. implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan seluruh desa di kecamatan Masbagik. pengawasan keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh seluruh desa di kecamatan Masbagik.

## **REFRENSI**

- Angelicca, Maya. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Dharma Yogyakarta.
- Anshori, Muslich dan Iswati, Sri. 2017. Metodologi Penelitoian Kuantitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
- Cohen, A. William. 2008. A Class With Drucker Pelajaran Berharga Dari Guru Manajemen No. 1 di Dunia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitrawansah. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai). Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi kasus. Jawa Barat: CV Jejak.
- Fransiska. 2015. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Labuhan Batu). Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, Muhammad. 2018. Pengaruh Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Medan. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2019. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Kusrini dan Koniyo, Andri. 2007. Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server. Yogyakarta: Andi Offset.
- Malle, Syarif Syahrir. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, Makassar.
- Masruron, Muhammad. 2020. Analisis Data Kuantitatif. Malang: Edulitera.
- Nasution, Dito Aditia Darma dan Br. Barus, Mika Debora. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Monograf. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/Permendagri/2008 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/Permendagri/611/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
- Pujanira, Putriasri. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Skripsi. Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmadhani, Herlambang. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: Deepublish.
- Rangkuti, Ahmad Zubeir. 2017. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Implementasi SIMDA Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi. Jurusan Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Ratnasari, Sri Langgeng. 2019. Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar. 2020. Pengantar Akuntansi. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika, Universitas Diponegoro.
- Sulistyowati, Ratna Indah. 2017. Pengaruh Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Sutrisno, H. Edy. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Yadiati, Winwin dan Mubarak, Abdulloh. 2017. Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoritis dan Empiris. Jakarta: Kencana.